



# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2023**

**DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2022 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi ke depan.

Jakarta, 21 Juli 2023

**Direktur Usaha dan Investasi**



**Catur Sarwanto**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2023 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan II Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain:

1. Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan antara pusat, daerah, dan instansi lintas sektoral perlu dilakukan secara intensif agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan. Metode pelaksanaan kegiatan perlu beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi Covid-19, dengan memaksimalkan pertemuan secara daring *ataupun hybrid* dan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun pelaku usaha/swasta untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan pemanfaatan pekerjaan secara periodik, serta monitoring dan evaluasi.
3. Harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah perlu terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha maupun calon investor.
4. Sinergi dalam pelaksanaan kegiatan antar unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi meupun dengan Direktorat lingkup Ditjen PDSPKP untuk percepatan pencapaian sasaran dan kinerja organisasi.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dicapai selama Tahun 2023, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi .....	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia.....	4
1.5. Permasalahan Utama .....	6
1.6. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1. Capaian Kinerja .....	19
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan.....	22
3.2.2. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Peluang Investasi Yang <i>Ready to Offer</i> .....	25
3.2.3. Sasaran Strategis 3: Terlaksananya promosi usaha dan investasi .....	29
3.2.4. Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.....	33
3.2.5. Sasaran Strategis 5: Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan.....	39
3.2.6. Sasaran Strategis 6: Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha .....	44
3.2.7. Sasaran Strategis 7: Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.....	56

3.2.8. Sasaran Strategis 8: Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi ....57

BAB IV. PENUTUP ..... 66

4.1. Kesimpulan ..... 66

4.2. Rekomendasi..... 66

4.3. Tindak Lanjut atas rekomendasi triwulan I..... 67

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Usaha dan Investasi.....	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023.....	20
Tabel 3.2	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan II Tahun 2023.....	23
Tabel 3.3	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan II Tahun 2023 .....	24
Tabel 3.4	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang <i>Ready to Offer</i> Triwulan II Tahun 2023.....	25
Tabel 3.5	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan II 2023 .....	30
Tabel 3.6	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Institusi Yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan Triwulan II 2023.....	33
Tabel 3.7	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan II 2023 .....	40
Tabel 3.8	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Triwulan II 2023.....	43
Tabel 3.8	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan II Tahun 2023 .....	44
Tabel 3.9	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan II Tahun 2023....	47
Tabel 3.10	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) pada Triwulan II Tahun 2023.....	51
Tabel 3.11	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan II tahun 2023.....	53

Tabel 3.12	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja <i>Startup</i> Milenial yang Difasilitasi dalam rangka Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi .....	55
Tabel 3.13	Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....	57
Tabel 3.14	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....	58
Tabel 3.15	Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023 .....	59
Tabel 3.16	Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan II Tahun 2023.....	59
Tabel 3.17	Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....	60
Tabel 3.18	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023 .....	61
Tabel 3.19	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2023 .....	63
Tabel 3.20	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023 .....	63
Tabel 3.21	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023 .....	64
Tabel 3.22	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023 .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang) .....	4
Gambar 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan .....	5
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin .....	5
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan .....	6
Gambar 3.1	Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023 .....	19
Gambar 3.2	Pertemuan Penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi .....	23
Gambar 3.3	Pertemuan Penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program .....	25
Gambar 3.4	Kegiatan <i>Benchmarking</i> industri pengolahan udang di Sidoarjo, Jawa Timur .....	26
Gambar 3.5	Kegiatan Survei dan FGD penyusunan peluang investasi industri pengolahan udang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah .....	27
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Promosi Peluang Investasi usaha Kelautan dan Perikanan .....	32
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor.....	34
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau .....	35
Gambar 3.9	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bandung .....	36
Gambar 3.10	Dokumentasi Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar.....	37
Gambar 3.11	Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha .....	39
Gambar 3.12	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Produk Kelautan dan Perikanan ....	41
Gambar 3.13	Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Klaster Daya Saing..	43

Gambar 3.14	Dokumentasi Kegiatan Penjaringan Minat dan Identifikasi Kebutuhan Usaha di Kabupaten Sragen.....	45
Gambar 3.15	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan.....	46
Gambar 3.16	Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Lokasi dan Debitur Potensial Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Rembang.....	48
Gambar 3.17	Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Lokasi dan Debitur Potensial Fasilitasi Akses Pembiayaan .....	49
Gambar 3.18	Dokumentasi Kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha secara <i>Online</i> dan <i>Offline</i> .....	52
Gambar 3.19	Kegiatan Fasilitasi sertifikat produksi pangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan.....	54
Gambar 3.20	Kegiatan Fasilitasi Startup Perikanan dalam rangka pengembangan Kampung Budidaya Patin di Sragen .....	56
Gambar 3.21	Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 20 Juli 2023 .....	61



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2023.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

## 1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 25 September 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Usaha dan Investasi;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

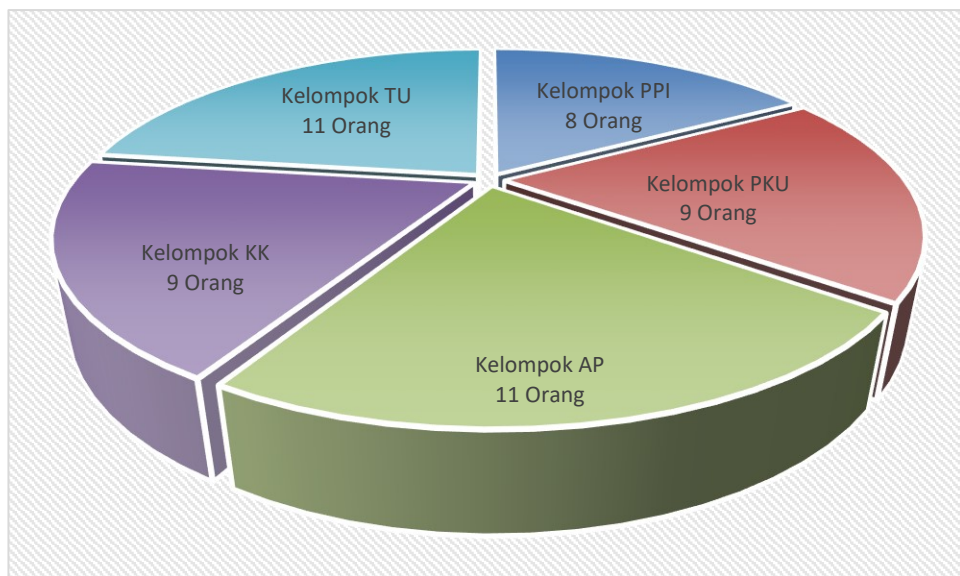
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### 1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

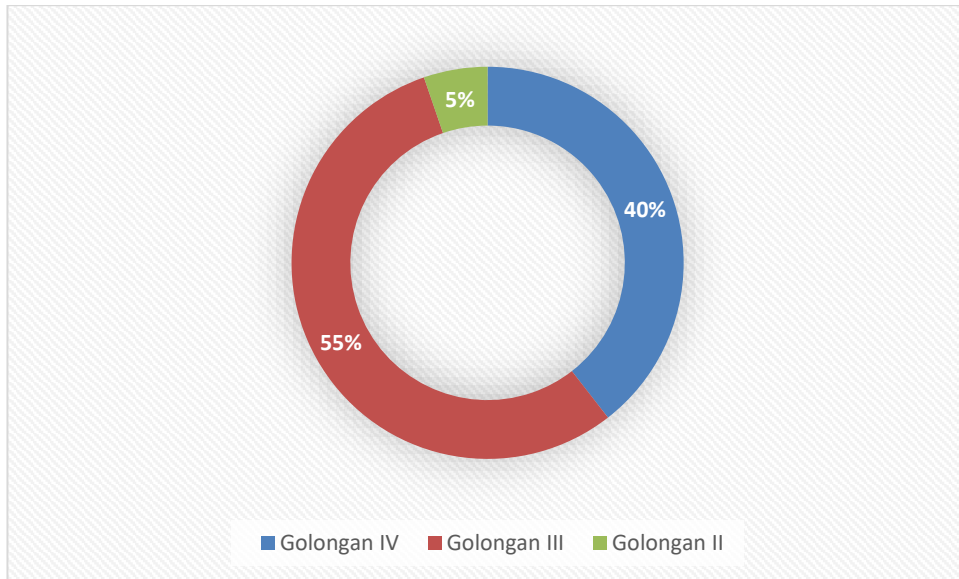
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berjumlah 49 orang, yang terdiri dari 38 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang tersebar di 4 Kelompok dan Kelompok Tata Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Kelompok Pemetaan dan Peluang Investasi (PPI) sebanyak 8 orang; Kelompok Pelayanan dan Kemitraan Usaha (PKU) sebanyak 9 orang; Kelompok Akses Permodalan (AP) sebanyak 11 orang; Kelompok Kewirausahaan dan Kelembagaan (KK) sebanyak 9 orang; dan Kelompok Tata Usaha sebanyak 11 orang.



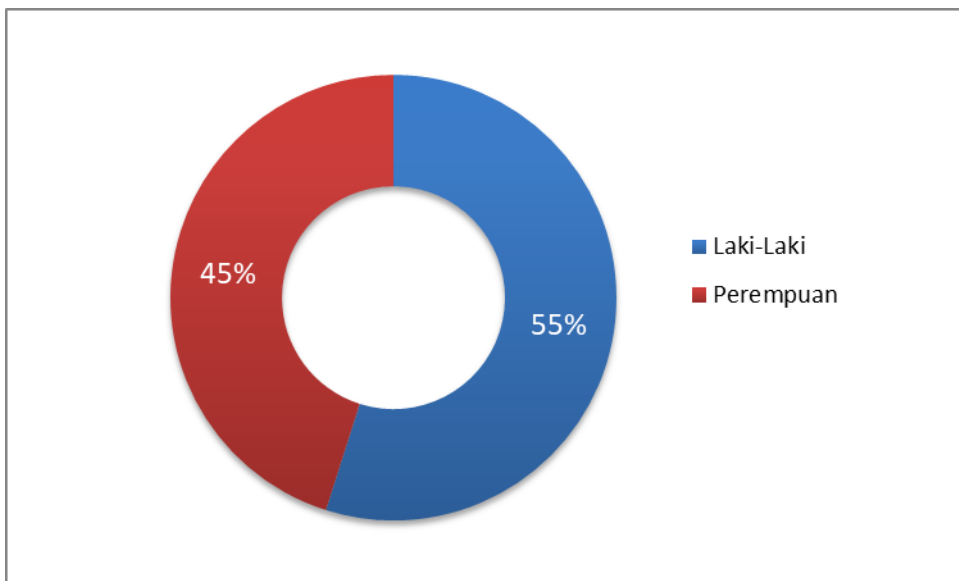
Gambar 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 21 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak pada golongan III, yakni 55%.



Gambar 1.2. Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

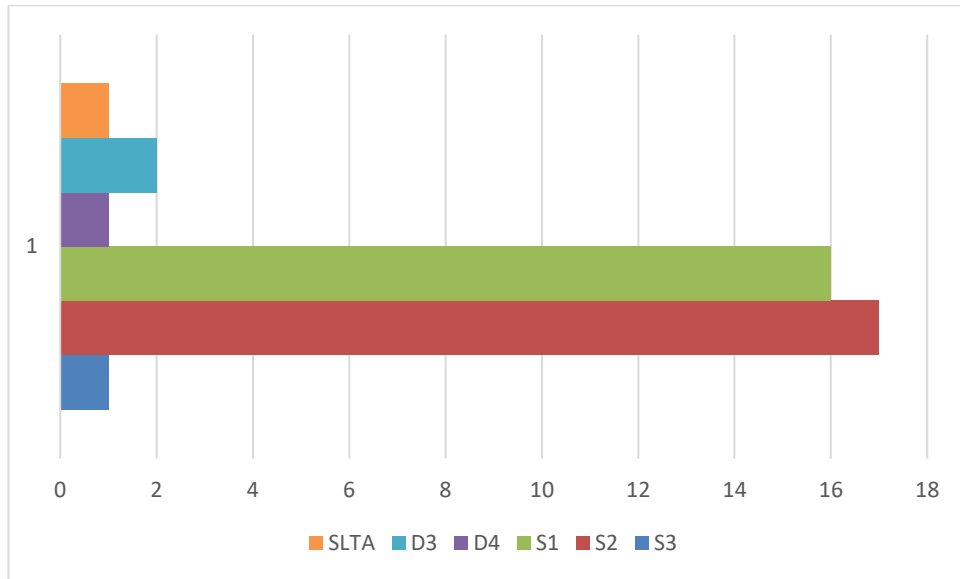
- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 28 orang, atau 55% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 45% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi.



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 16 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak dengan tingkat pendidikan S2, yakni mencapai 45%.





Gambar 1.4. Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

### 1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian. Pasca pandemi Covid-19 juga masih berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### 1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2023, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan II 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan II Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Usaha dan Investasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Usaha dan Investasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Usaha dan Investasi;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPKP/2021. Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 tersebut disusun sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

#### 2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk pembangunan nasional 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut tidak lain merupakan Visi Presiden tahun 2020-2024 yang juga diacu sebagai Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

#### 2.1.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan Misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun

2020-2024 serta mendukung 5 (lima) Program Utama Presiden yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan tanggal 9 Oktober 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi yaitu: **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.**

### 2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
  - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
  - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024;
  - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
  - d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;

e. meningkatnya konsumsi ikan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;

f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.

2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:

a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;

b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

#### 2.1.4 Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen.

Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
- 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
- 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.

b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.

b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
- 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.

c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

### 3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 produk pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (84,75) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;
- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020- 2024.



### 2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
  - a. promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan. Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah terlaksananya promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
  - b. Tersedianya peluang investasi yang *Ready to Offer*. Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:
    - 1) Identifikasi peluang usaha dan investasi dan
    - 2) penyusunan profil peluang investasi.
  - c. Klaster Daya Saing kelautan dan perikanan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya. Klaster Daya Saing produk kelautan dan perikanan

merupakan tempat pemusatan kegiatan industri perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan sehingga menghasilkan produk perikanan yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Langkah operasional untuk mendukung strategi peningkatan kapasitas Klaster Daya Saing ini adalah:

- 1) Pembentukan Lembaga Klaster Daya Saing KP; dan
  - 2) Pengembangan Lembaga Klaster Daya Saing KP;
- d. Pemantuan dan pengendalian investasi. Strategi pemantuan dan pengendalian ini ditujukan untuk percepatan realisasi investasi melalui:
- 1) Pemantuan rencana dan realisasi serta tren investasi; dan
  - 2) Pengendalian investasi bila terjadi kendala dalam realisasi investasi.
- Dalam pemantuan dan pengendalian ini, perlu dibangun koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait lainnya.
2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Fasilitasi kemitraan usaha. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan pengembangan kemitraan:
    - 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
    - 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
    - 3) Pendampingan dan monitoring.
  - b. Fasilitasi akses pembiayaan. Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu: (1) adanya gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan (2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah. Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan meliputi:
    - 1) penjaringan calon debitur potensial,
    - 2) peningkatan kelayakan usaha,
    - 3) sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,

- 4) pendampingan manajemen usaha,
  - 5) peningkatan literasi keuangan, dan
  - 6) pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).
- c. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA). Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
- 1) Rapat kerja teknis tenaga pendamping usaha; dan
  - 2) Pembinaan tenaga pendamping usaha .
- c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan. Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
- 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
  - 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
  - 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.
- d. Fasilitasi digitalisasi usaha. Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan online karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara online. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas.
- Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:
- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
  - 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
  - 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
  - 4) fasilitasi penyiapan desain website yang menarik (*mobile friendly*);
  - 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
  - 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
  - 7) responsif terhadap keluhan pelanggan

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2023.

Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan I mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Usaha dan Investasi**

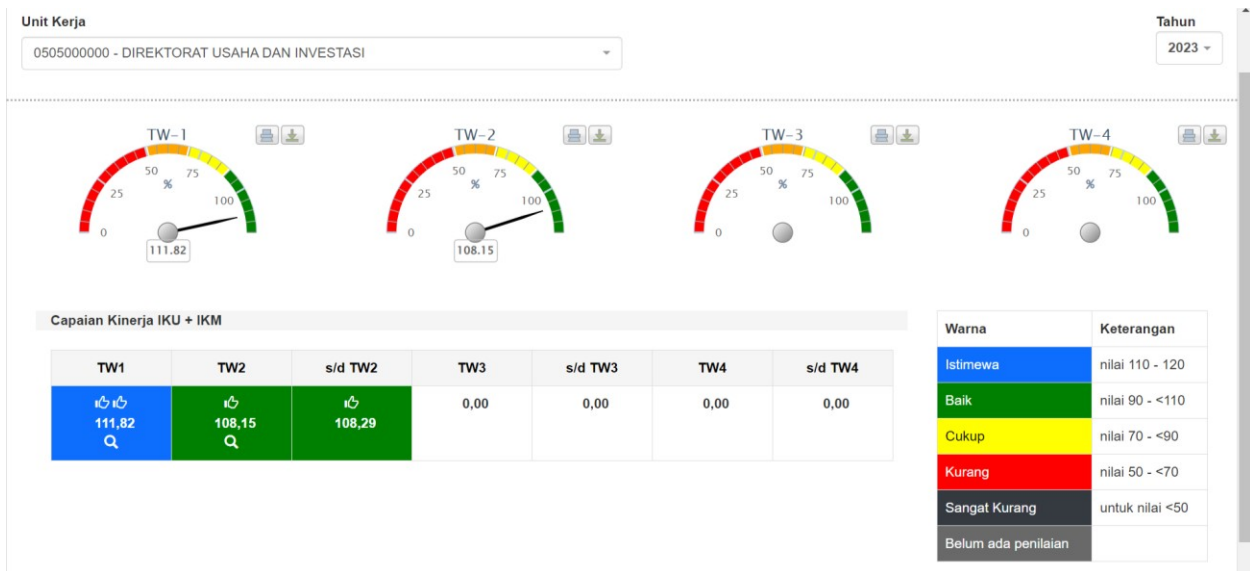
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2	Tersedianya peluang investasi yang ready to offer	3	Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4
3	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3
4	Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	5	Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1
5	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	6	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	35
		7	Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	3
6	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	8	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	585
		9	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	500
		10	UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.135
		11	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	84
		12	Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	8
7	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	13	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (orang)	4.794
8	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
		15	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2
		16	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5
		17	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	≤5
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
		20	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		21	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5
		23	Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1. Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023 sebesar 108,15%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan NPSS Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 111,82% dan capaian triwulan II tahun 2022 sebesar 108,50%.

Direktorat Usaha dan Investasi pada Tahun 2023 menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2023, terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi  
Triwulan II Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
			2023	TW II	TW II	Sd TW II	% thd Target TW II	% sd thd Target 2023
1	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	-	-	-	-	-
		2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	-	-	-	-	-
2	Tersedianya peluang investasi yang ready to offer	3. Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4	-	1	1	100	25
3	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3	-	-	1	-	33,33
4	Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1	-	-	-	-	-
5	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	35	6	6	10	100	28,57
		7. Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	3	-	-	-	-	-
6	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	585	80	100	180	100	30,77
		9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	500	100	100	154	100	30,80

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
			2023	TW II	TW II	Sd TW II	% thd Target TW II	% sd thd Target 2023
		10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.135	500	600	708	120	33,16
		11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	84	20	20	35	100	41,67
		12. Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	8	-	-	1	-	17,86
7	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (orang)	4794	-	-	-	-	-
8	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75	-	-	-	-	-
		15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2	76	76,80	-	-	-
		16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5	-	-	-	-	-
		17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	≤5	-	-	-	-	-
		18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75	75	100	-	133,33	133,33
		19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1	-	-	-	-	-
		20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem	92	92	100	-	108,7	108,7



No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
			2023	TW II	TW II	Sd TW II	% thd Target TW II	% sd thd Target 2023
		manajemen pengetahuan yang terstandar (%)						
		21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95	-	-	-	-	-
		22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-	-	-	-
		23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-	-	-	-

### 3.2.1. Sasaran Strategis 1

**Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan**

#### IK1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur. Selain itu untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi termasuk dalam *outcome* yang harus dicapai Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 5%. Nilai tersebut diperoleh dari persentase selisih pelaku usaha

yang melakukan investasi pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Capaian tersebut belum dapat dihitung pada Triwulan I, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi baru dilakukan pada akhir tahun.

Untuk mencapai nilai tersebut Direktorat Usaha dan Investasi melaksanakan pertemuan dalam rangka penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi sebanyak 1 kali pada triwulan II pada tanggal 23 Mei 2023 di ruang Direktur Usaha dan Investasi.

**Tabel 3.2 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			
		2023	TW II	TW II	Sd TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	-	-	-	-	-

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Koordinator Kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi dan Kasubbag Tata Usaha Direktorat Usaha dan Investasi untuk menghitung dan mengevaluasi capaian indikator jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada periode berjalan.



Gambar 3.2 Pertemuan penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

## IK2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan kredit program lainnya, yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan pelaku Usaha KP yang mendapatkan kredit program periode tahun 2023 adalah akumulasi pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program periode bulan Januari-Desember 2023. Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung realisasi pertumbuhan debitur kredit program pada periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya (*year on year*). Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 8%. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan II, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program baru dilakukan pada akhir tahun.

**Tabel 3.3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	-	-	-	-

Untuk mencapai nilai tersebut Direktorat Usaha dan Investasi melaksanakan pertemuan dalam rangka penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan sebanyak 1 kali pada triwulan II pada tanggal 19 Juni 2023 di ruang rapat Direktorat Usaha dan Investasi. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Koordinator Kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi dan Kasubbag Tata Usaha Direktorat Usaha dan Investasi untuk menghitung capaian jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada periode berjalan.



Gambar 3.3 Pertemuan penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

**3.2.2. Sasaran Strategis 2**

**Tersedianya Peluang Investasi Yang Ready to Offer**

**IK3. Peluang investasi Yang Ready to Offer**

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (*ready to offer*) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek (i) legalitas; (ii) finansial; (iii) teknis produksi dan operasional; (iv) sosial ekonomi. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan (i) identifikasi lokasi/kawasan potensial; (ii) Koordinasi dan perbahasan konsep kajian; (iii) penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* oleh Tim Konsultan; (iv) FGD pengayaan data dan informasi di daerah, dan (v) pendampingan.

**Tabel 3.4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang Ready to Offer Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
3	Peluang investasi yang ready to offer	4	-	1	100	25

Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* pada triwulan II tahun 2023 telah tercapai 1 (satu) dokumen peluang investasi yang *ready to offer* atau mencapai 25,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni 4 dokumen. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 sebesar Rp249,271,293,- atau 33,24% dari total anggaran sebesar Rp750.000.000,-.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP antara lain:

1. *Benchmarking* industri pengolahan udang di Sidoarjo, Jawa Timur

*Benchmarking* informasi industri pengolahan udang di Sidoarjo, Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk pengayaan informasi terkait industri hilir udang dengan melakukan kunjungan ke perusahaan yang bergerak dalam usaha budidaya dan pengolahan udang. Kunjungan dilaksanakan ke pabrik pengolahan udang PT. Sekar Bumi Group Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan udang di Indonesia. Bisnis utama PT. Sekar Bumi adalah pengolahan udang segar, udang beku, dan produk olahan udang seperti udang kupas, udang rebus, dan produk-produk makanan laut lainnya yang dijual ke pasar luar negeri utamanya Jepang maupun diekspor ke negara-negara di Asia dan Eropa.



Gambar 3.4 kegiatan *Benchmarking* industri pengolahan udang di Sidoarjo, Jawa Timur

Kunjungan ke PT. Sekar Bumi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengumpulan data kajian untuk peninjauan BUBK Kebumen untuk pengembangan usaha udang baik pada sisi hulu maupun pada sisi hilir. KKP menyampaikan bahwa tujuan pembangunan BUBK selain untuk membangun model percontohan budidaya udang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Sekar menyambut baik adanya pembangunan BUBK Kebumen terutama pemanfaatannya sebagai salah satu site budidaya udang vaname di Jawa Tengah, dengan beberapa masukan antara lain (1) Hasil produksi dari BUBK Kebumen kiranya juga dapat mendukung kebutuhan industri eksisting, dimana saat ini rata-rata kapasitas terpasang dari industri mencapai 65%; (2) Pembangunan BUBK Kebumen

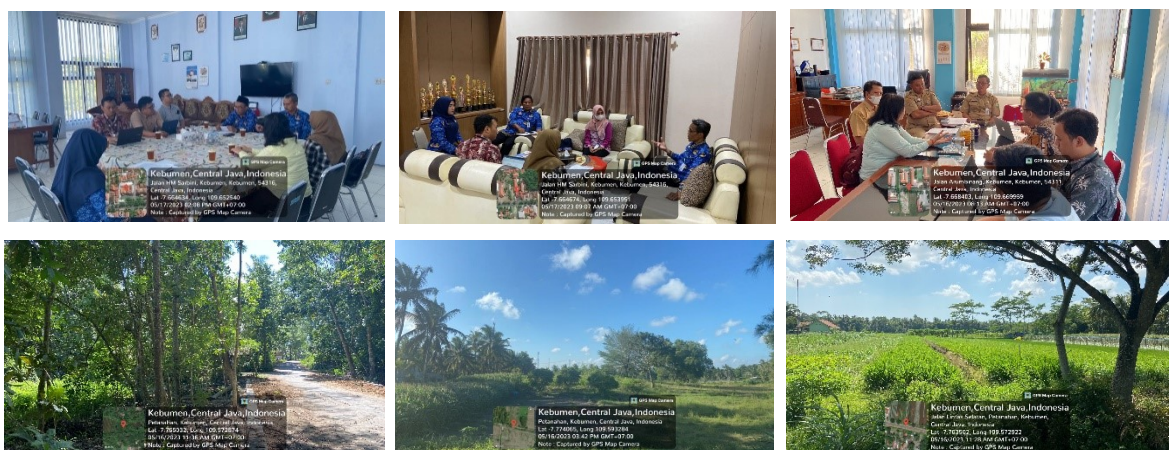
kedepannya akan dapat direplikasi pada lokasi-lokasi potensial budidaya udang vaname

2. Survei dan FGD penyusunan peluang investasi industri pengolahan udang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Kegiatan survei/kunjungan lapangan dan FGD di Kebumen, Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 15 – 20 Mei 2023 dalam rangka penyusunan peluang investasi *ready to offer* di kabupaten Kebumen dengan komoditas udang vaname dilakukan dengan tujuan pengayaan informasi terkait industri hilir udang

Survei lokasi dilakukan ke tiga desa yaitu (a) Desa Karangrejo menyediakan dua lahan milik desa dengan luas masing-masing 1,5 ha dan 2 ha dan satu lahan milik pmda dengan luas 2 ha; (b) Desa Karanggadung yang sebelumnya menjadi lokasi alternatif tidak dapat digunakan karena lahan sisa dari shrimp estate telah menjadi master plan untuk pengembangan wisata pandan kuning; (c) Desa Tegalretno menyediakan dua lahan milik desa luas masing-masing 5,3 ha dan 6 ha.

Selain itu dilaksanakan kunjungan ke stakeholder yaitu tambak budidaya udang milik masyarakat (kelompok) di desa Karangrejo lahan milik pemkab seluas 10,8 ha terdiri dari 9 petak tambak dengan sistem budidaya parsial dan intensif. Sumber benih dari bandar sebagai pemasok benih dan pakan (jenis benur Summa dan benur Baramuli) dengan padat tebar 180-200 ekor/m<sup>2</sup> di luas petak 1.200 m<sup>2</sup>. Siklus panen 3 – 4 kali panen (umur 65 – 70 hari) dengan FCR 1,5 – 1,6 dan survival rate 80%.



Gambar 3.5 kegiatan Survei dan FGD penyusunan peluang investasi industri pengolahan udang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Peluang Investasi Industri Pengolahan Udang Terpadu di Kabupaten Kebumen pada hari Jumat 19 Mei 2023 di Ruang Rapat Kantor DLHKP Kabupaten Kebumen. Dihadiri oleh perwakilan dari DLHKP, DPMPTSP, PUPR, Disperindag, Pengelola BUBK, penyuluh perikanan, Kepala Desa Karanggadung, Karangrejo, Jokosimo, Tegaretno, dan Tanggulangin, serta kelompok petambak. Diskusi dari pemaparan hasil kunjungan lapang dalam kegiatan FGD adalah dari 3 lokasi desa yang sudah di survey masih ada 2 desa yang memiliki lahan potensial untuk dapat dipromosikan yaitu Desa Jokosimo dan Desa Tanggulangin.

3. Penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* industri pengolahan udang terintegrasi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Kegiatan penyusunan peluang investasi *ready to offer* industri pengolahan udang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah adalah (1) mengidentifikasi kebutuhan investasi dasar dan infrastruktur pendukung usaha kelautan dan perikanan (Unit Pengolahan Udang Terintegrasi); (2) menyusun analisis kelayakan peluang investasi kelautan dan perikanan. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen peluang investasi kelautan dan perikanan yang telah dinilai layak dan siap ditawarkan (*ready to offer*)

Hasil penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* industri pengolahan udang terintegrasi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai berikut

- 1) Kehadiran Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) menjadi pendorong peningkatan daya saing dan peluang investasi hilirisasi udang di Kabupaten Kebumen. Proyek yang ditawarkan adalah industri pengolahan udang terintegrasi yang merupakan unit pengolahan udang pertama di Kabupaten Kebumen. Industri pengolahan udang terintegrasi merupakan usaha peningkatan nilai tambah hasil perikanan budidaya dari udang segar menjadi udang beku dan olahan perikanan budidaya dari udang segar menjadi udang beku dan olahan
- 2) Lokasi, potensi dan status lahan yang akan ditawarkan yaitu rencana pembangunan pabrik di Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan dengan luas 3,2 ha lahan milik desa, rencana lokasi tambak ada 2 lokasi alternatif di Desa Jogosimo Kecamatan Klirong luas 69,4 ha lahan milik desa dan Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring luas 30 ha lahan milik pemda. Skema yang

akan ditawarkan adalah sistem sewa dengan estimasi harga sewa lahan desa Rp 9.000/m<sup>2</sup> dan lahan pemda Rp 1.400/m<sup>2</sup>

- 3) Hitungan kelayakan finansial didapatkan nilai investasi sebesar Rp 135,84 miliar dengan capex sebesar Rp 99,86 miliar dan opex sebesar Rp 35,97 miliar. IRR sebesar 37,60% dengan NPV sebesar Rp 408,27 miliar dengan payback periode selama 4 tahun 1 bulan.
- 4) Target produksi total 2.000 ton/tahun dengan rincian 900 ton/tahun untuk udang beku, 400 ton/tahun udang masak beku utuh, 400 ton/tahun udang masak beku (processed), dan 300 ton/tahun produk olahan udang. Kebutuhan bahan baku yang berasal dari tambak (benur udang vaname) sebesar 640 ribu ekor/tahun dan industri pengolahan udang (udang vaname segar) sebesar 3.000 ton/tahun dengan 70% berasal dari udang segar dihasilkan oleh tambak sendiri dan 30% udang segar berasal dari akuisis tambak yang ada di Kebumen.

### **3.2.3. Sasaran Strategis 3**

#### **Terlaksananya promosi usaha dan investasi**

#### **IK4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan**

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Tahapan kegiatan meliputi (i) pemetaan data potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; (ii) promosi peluang investasi usaha kelautan dan perikanan; dan (iii) pendampingan investasi. Kegiatan Fasilitasi Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk: (i) Mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada pelaku usaha/calon investor; (ii) Fasilitasi *Investment matching* antara *G to B* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan calon investor dan *B to B* antara perusahaan dengan calon investor. Indikator kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP merupakan target tahunan sehingga perhitungan capaian baru dilakukan pada saat penilaian akhir tahun anggaran 2023.



**Tabel 3.5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan II 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian sd TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
4	Promosi Usaha dan Investasi KP (Kegiatan)	3	-	1	-	33,33

Namun demikian dalam rangka memenuhi capaian tersebut Direktorat Usaha dan Investasi telah melaksanakan beberapa kegiatan selama triwulan II. Kegiatan promosi investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pendampingan rencana investasi Capricornia Prawn (PMA Australia) sinergi dengan IIPC Sydney dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023. Capricornia Prawn berminat berinvestasi di usaha budidaya udang windu dengan nilai investasi sebesar 12 juta dollar Australia atau sekitar Rp 120 Miliar. Investasi ditargetkan pada tahun ini dengan lokasi tujuan Bali, luas lahan yang dibutuhkan 5-10 ha. Capricornia Prawn siap bermitra dengan UMKM setempat dan melakukan transfer teknologi.
2. Pendampingan investasi industri rumput laut kepada Alpha JWC Ventures dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023. Alpha JWC Ventures saat ini tertarik untuk menjajaki peluang usaha pada *alginate powder* yang akan digunakan sebagai bahan tekstil dengan target pasar di Amerika Serikat. Ditjen PDS akan berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya dan Pemerintah Daerah dalam rangka pendampingan kepada Alpha JWC Ventures untuk identifikasi wilayah potensial di mana kelimpahan spesies *Sargassum* ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pengembangan industri rumput laut dan produksi *alginate*.
3. Pendampingan investasi budidaya rumput laut kepada PT. Seasix Energi bersama Ditjen PRL dan DJPB. PT Sea Six Energy berminat untuk investasi pada usaha budidaya rumput laut di beberapa lokasi, namun lokasi yang dituju oleh PT Seasix Energi tidak sesuai peruntukan untuk budidaya rumput laut antara lain (1) Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan jalur pipa gas dan kabel bawah laut; (2) Kabupaten Bengkayang, Jepara dan Paser merupakan area konservasi. Lokasi yang sesuai dengan peruntukan budidaya rumput laut hanya Kabupaten Lombok. Lokasi lainnya merupakan zona perikanan tangkap.
4. Pendampingan investasi budidaya rumput laut kepada PT. Mitra Agro Global bersama Ditjen PRL, DJPB, Kadis KP Prov Sulawesi Tengah dan Kadis Perikanan

Kab Morowali Utara. PT Mitra Agro Global menargetkan investasi budidaya rumput laut seluas 200 Ha. PT. Mitra Agro Global berencana mengembangkan *seaweed farm* di Kabupaten Morowali Utara dengan jenis rumput laut *Spinosum* dan *Cottoni* menggunakan sistem budidaya metode *longline*. Beberapa tahun terakhir produksi rumput laut di Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan. Adanya investasi budidaya rumput laut oleh PT. Mitra Agro Global diharapkan dapat meningkatkan kembali produksi rumput laut di Kabupaten Morowali Utara, serta dapat meningkatkan kembali minat masyarakat untuk budidaya rumput laut.

5. Pendampingan investasi usaha budidaya lobster air tawar Redclaw kepada Noola Redclaw Ltd (calon investor dari Inggris) di Klaten dan Sragen, Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 13-16 Juni 2023. Noola Redclaw Ltd menawarkan kerja sama investasi usaha budidaya lobster air tawar (redclaw/crayfish) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rencana kerja sama investasi diantaranya melalui penyediaan benih unggul, transfer teknologi dan siap menjadi *offtaker* hasil panen para pembudidaya mitra. Rencana investasi untuk pengembangan budidaya lobster air tawar sekitar Rp 9,4 Miliar.
6. Pendampingan investasi pengolahan rumput laut kepada PT Indo Rama dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023. PT Indo Rama berminat berinvestasi untuk pengolahan rumput laut jenis ulva dan limbah budidaya udang untuk pakan. PT Indo Rama tertarik untuk peninjauan investasi di Kabupaten Wakatobi dan direncanakan pada Juli 2023 melakukan kunjungan ke Wakatobi. Direktorat Usaha dan Investasi akan berkoordinasi dengan Pemda Wakatobi terkait produksi rumput laut khususnya jenis ulva.
7. Pendampingan investasi budidaya rumput laut kepada Alginnova (perusahaan riset asal Swedia) dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023. Alginnova tertarik mengembangkan budidaya rumput laut di Indonesia dengan menggunakan bibit rumput laut (*cottoni*) hasil riset yang dikembangkan oleh Alginnova. Bibit rumput laut yang dikembangkan dapat tumbuh di perairan dalam segala kondisi. Pada tahap awal, berminat berinvestasi di luasan lahan 5-10 hektar untuk ujicoba bibit rumput laut dan apabila berhasil akan diperluas menjadi 100 hektar. Untuk rencana investasi, perusahaan ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Swedia.
8. Pendampingan investasi rumput laut kepada PT Sea Six Energy dan PT Regenerasi Kehidupan Nusantara (RKN) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara

dilaksanakan pada tanggal 23-26 Juni 2023. Berdasarkan hasil perhitungan analisa kelayakan bisnis yang dilakukan oleh Manajer operasional PT Sea Six, Wakatobi memiliki prospek bisnis untuk investasi pabrik pupuk, dilihat dari ketersediaan rumput laut, dukungan pemda, tersedianya sumberdaya manusia terdidik (terdapat Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi), tol laut dan infrastruktur dasar pendukung investasi (air dan listrik). Hasil perhitungan ini akan disampaikan ke pimpinan PT Sea Six Energy dan hasil keputusan akan segera disampaikan kepada Ditjen PDS. PT RKN siap membeli rumput laut dari Wakatobi dan dikirimkan ke pabrik di Kendari untuk diolah lebih lanjut menjadi pupuk cair. Hasil kesepakatan dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi bahwa pupuk yang dihasilkan akan dikirimkan kembali ke Wakatobi untuk lahan pertanian yang sedang dikembangkan oleh Dinas Pertanian Wakatobi



Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Promosi Peluang Investasi usaha Kelautan dan Perikanan

Pada indikator kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP, jumlah realisasi anggaran selama periode triwulan II tahun 2023 adalah sebesar Rp603,725,854,- atau 21,87% dari total anggaran sebesar Rp2,759,981,000,-.

**3.2.4. Sasaran Strategis 4**

**Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan**

**IK5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan**

Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan budaya pelayanan prima, penerapan standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.

Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena indikator kinerja ini baru di tahun 2023. Indikator kinerja Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan II, hal ini dikarenakan penilaian terhadap layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha KP baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

**Tabel 3.6. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Institusi Yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan Triwulan II 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian sd TW II	% thdTarget TW IV	% thdTarget 2023
5	Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1 layanan	-	-	-	-

Kegiatan Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan II, meliputi:

1. Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sosialisasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan mengundang Direktorat Usaha dan Investasi sebagai salah satu pembicara, antara lain :

- 1) Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor  
Acara sosialisasi dibuka oleh Kabid PDSPP Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor dan dihadiri oleh perwakilan pelaku usaha dan penyuluh perikanan dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bogor, seperti Ciawi, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur, dll. Kegiatan bertujuan untuk sosialisasi pembuatan NIB dan izin usaha bagi pelaku usaha perikanan lingkup Kabupaten Bogor.

Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 30 peserta, memang tidak mewakili, tapi diharapkan adanya efek domino kepada pelaku usaha yang tidak hadir. Dari 30 pelaku usaha yang ikut kegiatan, berhasil 19 pelaku usaha mendapatkan NIB dan akan lanjut ke tahap sertifikat standar sambil menyiapkan persyaratan dasar yang belum terpenuhi. Adapun materi yang disampaikan adalah terkait Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan Ikan melalui OSS-RBA dan tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM).



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor

- 2) Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau  
Sosialisasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Tujuan kegiatan adalah (a) Meningkatkan Pengetahuan UPI tentang Persyaratan dan Ketentuan Perizinan; (b) Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di industri dengan penerbitan perizinan yang efektif dan sederhana; (c) Menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam berusaha.

Peserta kegiatan Sosialisasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1(satu) Daerah Tahun 2023 berasal dari 7 yang hadir dari Dinas Perikanan Kab/Kota dan UPI yaitu Kab . Kampar, Kab Bengkalis, Kab Siak, Kab Rohul, Kab Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Adapun materi yang disampaikan pada rapat koordinasi perizinan berusaha antara lain (a) Perizinan Usaha Pengolahan Ikan Berbasis Risiko" oleh Direktur Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan; (b) Perizinan Usaha Pemasaran Ikan Berbasis Risiko" oleh Direktur Pemasaran, Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan dan (c) Implementasi Perizinan *Online Single Submission* (OSS) – RBA Berbasis Risiko oleh DPMPTSP Provinsi Riau.



Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau

- 3) Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bandung  
Rapat dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat tanggal 16-17 Mei 2023 di Hotel Grand Sunhine Resort and Convention, Bandung. Adapun materi yang disampaikan pada rapat koordinasi perizinan berusaha antara lain (a) Pelayanan Pajak bagi pelaku usaha perikanan oleh Kantor Pajak Pratama Kab. Soreang; (b) Perizinan Berusaha *melalui online single submission* (OSS-RBA) berbasis risiko sub sektor pengolahan ikan oleh Direktorat Usaha dan Investas; (c) Perizinan Berusaha *melalui online single submission* (OSS-RBA) berbasis risiko sub sektor Pembudidaya ikan oleh Direktorat Jenderal Budidaya; dan (d) Materi 3 Perizinan Usaha melalui OSS / Pendampingan Pembuatan Izin Usaha (NIB).

Pelaksana mensosialisasikan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan melalui OSS berbasis risiko dengan tujuan dan harapan sebagai berikut: (a) Menambah wawasan bagi pelaku usaha atau *stakeholder*, antara lain Unit Pengolah Ikan, Pemerintah, petugas pelayanan pemerintah, serta masyarakat umum terkait meningkatkan wawasan terkait Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Ikan melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko serta Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021; (b) Memfungsikan PTSP Pusat dan Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan informasi dan layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA untuk kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

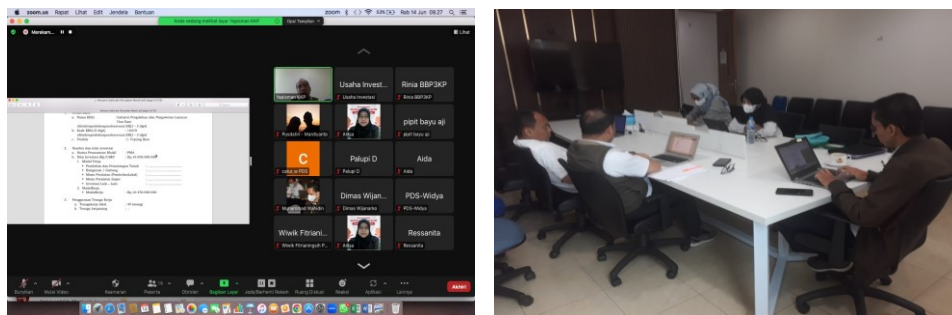


Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bandung

- 4) Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kota Bekasi
- Kegiatan Pelatihan Pembinaan terhadap Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil dilaksanakan tanggal, 13 April 2023 di Kopi Raga, Kota Bekasi. Kegiatan diikuti oleh 60 UPI Skala Mikro dan Kecil. Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha Miro dan Kecil agar mengetahui jenis perizinan usaha yang ditetapkan dan cara perolehan perizinan tersebut di Sistem OSS. Kegiatan perlu dilaksanakan mengingat terjadinya perubahan perizinan berusaha sektor perikanan dengan berlakunya UUCK.
- Materi yang disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari (a) Implementasi Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Ikan Berbasis Risiko (OSS – RBA); (b) Pemenuhan Regulasi dan Mutu Sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) pada Unit Pengolahan Skala Mikro Kecil; (c) Persyaratan Tata Cara SNI Sukarela; (d) Persyaratan sesuai standar.

## 2. Penerbitan Sertifikat Standar

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar usaha selama periode triwulan II 2023, telah dilaksanakan 5 (Lima) rapat verifikasi, pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP. Adapun Selama periode April - Juni 2023 telah diterbitkan 19 sertifikat standar kepada 15 pelaku usaha yang bermohon sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.



Gambar 3.10 Dokumentasi Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar

## 3. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perizinan berusaha telah dilakukan kunjungan lapangan ke 5 (Lima) UPI yang telah memiliki sertifikat standar di Bogor, Surabaya, Majalengka, dan Indramayu, kelima UPI tersebut antara lain :

### 1) PT. Citra Dimensi Arthali (CEDEA)

PT.CEDEA adalah Perusahaan PMA dengan Negara Thailand Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, lokasi pabrik di Jl. Raya Cirebon Bandung KM 35. Blok Post RT02/07 Desa/Kelurahan Sindangwasa, Kecamatan Palasah Kab. Majalengka, Ekspor ke Jepang, Perkembangan Usaha Pengolahan Ikan sebagai berikut: Omset Rp78,724,519,176 Januari sd April 2023. Tenaga Kerja saat ini terdiri dari WNI Pria 294 orang dan Wanita 103 karyawan tetap dan 347 pria dan 218 wanita



orang karyawan tidak tetap, serta 2 tenaga kerja asing karyawan tidak tetap. Mitra usaha antara lain pedagang seblak, pedagang gerobak, angkringan, pedagang baso pasar tradisional;

2) PT. Java Seafood

PT Java Seafood adalah Perusahaan PMA dengan Negara Korea, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya (KBLI) 10219, yaitu surimi dan frozen seafood dengan jenis ikan seperti kurisi, mata goyang, coklatan kapasan kuniran. Lokasi Usaha di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Ekspor Surimi ke Jepang, dan Frozen Seafood ke Korea Selatan sedangkan untuk pemasaran lokal dikirim ke Majalengka dan Jakarta.

3) Jakarana Tama

Jakarana Tama merupakan perusahaan modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura dengan alamat kantor di Kebayoran Lama, Jakarta selatan dan pabrik di Ciawi Kabupaten, Bogor, Jawa Barat. Perusahaan ini mengajukan izin usaha untuk KBLI 10216 – industri berbasis daging lumatan dan surimi dengan produk akhir berupa otak- otak.

Perusahaan memiliki kapasitas cold storage sebesar 30 ton sebanyak 2 unit. Nilai investasi yang tercatat dalam rencana usaha yang diajukan sebesar Rp15,5 Miliar. Perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak 150 orang yang tercatat dalam rencana usaha, semua tenaga kerja lokal.

4) Naka Tujuh Gemilang

UPI ini memiliki modal investasi sekitar Rp5 milyar, dengan produk berupa rumput laut kering. Sebagian besar rumput laut yang digunakan adalah spinosum dan sedikit cottonii. Bahan baku berupa rumput laut kering dan berasal dari Makassar. Produksi mencapai 40 ton/bulan, masih jauh dari target yang mencapai 200 ton/bulan. Harga bahan baku Rp7000 sd 8000 per-kg dan dijual dengan harga Rp9000 sd 10.000 per-kg. UPI ini baru beroperasi sekitar bulan April- Mei 2023. Pemasaran seminggu sekali dan masih sekitar lokal. Kendala yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku dan belum memiliki izin usaha (sedang dalam proses). Hal ini disebabkan karena ada perubahan KBLI. Jumlah tenaga kerja 19 orang. UPI ini juga masih melakukan renovasi

dan penambahan tempat jemur untuk rumput laut. Rencana ke depan, UPI akan membuat *middle* produk dari spinosum dan ulva dalam bentuk cacahan.

5) Kaya Samudra Global

UPI ini memiliki produk berupa rumput laut kering yang sudah dicacah. Bahan baku berupa rumput laut kering dari Madura, Lampung, NTB dan NTT. Rumput laut yang digunakan jenis sargassum. Harga bahan baku sekitar Rp. 3000/kg dan dijual dengan harga Rp4000 sd 5000 per-kg. Pemasaran seluruhnya diekspor ke Cina.



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan fasilitasi perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan perikanan adalah sebesar Rp253.554.387,- atau setara dengan 38,71 % dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp655.000.000,-

### 3.2.5. Sasaran Strategis 5

**Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan**

#### IK6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya

Dalam rangka memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 10/MEN-KP/KB/VIII/2021 dan 17/KB/M.KUKM/VIII/2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP menindaklanjutinya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bagi koperasi dan UMKM yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021. Salah satu wujud sinergi program yang dilaksanakan yakni mendorong UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk dapat naik kelas melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, dari semula berbentuk kelompok usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Diharapkan dengan terbentuknya koperasi maka poklahsar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengakses pembiayaan serta meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pelaku usaha lain.

Pada tahun 2023 kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya.

**Tabel 3.7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan II 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian sd TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
6	Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya	35	6	10	100	28,57

Target Lembaga usaha yang akan ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya pada tahun 2023 sebanyak 35 lembaga. Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan II

tahun 2023 telah mencapai 6 lembaga usaha, hal ini sesuai target dan telah mencapai 100%, jika diakumulasikan sampai dengan TW II maka realisasi lembaga usaha hasil KP yang telah ditingkatkan sebanyak 10 lembaga usaha, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 35 lembaga usaha, maka sudah tercapai sebesar 28,57%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 triwulan II, capaian lembaga usaha yang tercapai hanya 18 lembaga usaha sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 20 lembaga usaha.

Pada triwulan II, telah dilakukan kegiatan identifikasi kebutuhan lembaga usaha di Kabupaten Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, adapun tujuan dilakukannya identifikasi kebutuhan untuk memperoleh informasi keinginan/kebutuhan lembaga usaha yang diperlukan dalam rangka penguatan tata kelola usaha koperasi baik manajemen maupun keuangan. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan juga telah dilakukan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bandung, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung lembaga usaha koperasi dalam mengembangkan usahanya.



Gambar 3.12 Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Produk Kelautan dan Perikanan

Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan II Tahun 2023, yaitu:

- 1) Koperasi Bumi Kartini Mina di Jepara;
- 2) Koperasi Mino Mulyo Abadi di Pati;
- 3) Koperasi Agar Makmur Sentosa di Sidoarjo;
- 4) Koperasi Berkah Makmur Bersama di Karawang.
- 5) Koperasi Pemasaran Mina Usaha Rembulan di Kabupaten Sumbawa;
- 6) Koperasi Produsen Mari Makan Ikan di Kabupaten Bandung;
- 7) Koperasi Pemasaran Pijarmas Kabupaten Demak;
- 8) Koperasi Poklahsar Jaya Bersama di Kabupaten Gowa.
- 9) Koperasi Usaha Amanah Berkah di Kota Makassar;
- 10) Koperasi Mitra Pangan Nusantara di Kabupaten Gowa.

Alokasi anggaran untuk lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp781.000.000,-, hingga triwulan II anggaran yang terserap adalah sebesar Rp409.486.158,- atau setara dengan 52.43% dari total anggaran.

#### **IK7. Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya**

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diperlukan strategi pelaksanaan arah kebijakan diantaranya adalah pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan usaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan yang diintegrasikan hulu – hilir dalam model sebuah Klaster Daya Saing.

Klaster daya saing ini merupakan kumpulan dari berbagai unit usaha kelautan dan perikanan yang berhubungan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan difasilitasi program pengembangan usaha agar memiliki daya saing SDM, produk, dan perusahaan, serta mampu mengangkat daya saing daerah dan nasional. Klaster daya saing merupakan salah satu model kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk menarik investasi baik PMA maupun PMDN dan berkelanjutan usaha pada usaha sektor kelautan dan perikanan.

Tujuan utama dilaksanakannya Klaster Daya Saing adalah untuk penguatan daya saing di suatu kawasan tertentu dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas

masyarakat dan/atau pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

**Tabel 3.8. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Triwulan II 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian sd TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
7	Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	3	-	-	-	-

Pada tahun 2023 kegiatan Kluster Daya Saing terdiri dari pembentukan lembaga kluster daya saing dan pengembangan lembaga kluster daya saing. Lembaga kluster daya saing merupakan lembaga usaha yang mampu menggerakkan atau mengelola kawasan kluster daya saing di lokasi tertentu. Target lembaga usaha yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 3 lembaga. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan II, hal ini dikarenakan penilaian terhadap Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, beberapa kegiatan yang mendukung capaian tersebut telah dilaksanakan yaitu:

1. Rapat pembahasan finalisasi petunjuk teknis (Juknis) Kluster Daya Saing (KDS). Beberapa hal pembahasan meliputi format juknis; susunan draft juknis pelaksanaan KDS; penyesuaian narasi terkait Implementasi; penjelasan mengenai peran pemerintah; penentuan misi dan visi Lembaga Pengelola KDS.
2. Pertemuan lanjutan untuk pembahasan dan pematangan tahap dalam perencanaan kegiatan pengembangan kluster daya saing dalam hal seleksi pemilihan lokasi KDS dan peran Lembaga Pengelolaan.



Gambar 3.13 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Kluster Daya Saing

Alokasi anggaran untuk Lembaga Usaha Berbasis Klaster Daya Saing yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp595.000.000,- hingga triwulan II anggaran yang terserap adalah sebesar Rp63.920.093,- atau setara dengan 10,74% dari total anggaran.

### 3.2.6. Sasaran Strategis 6

#### Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha

#### IK8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina

Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan.

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 585 wirausaha. Pada triwulan II tahun 2023 target yang ditetapkan sebanyak 100 UMKM/wirausaha dan sesuai dengan target capaian pada TW II yaitu sebanyak 100 UMKM/Wirausaha dan setara dengan 100%. Apabila di akumulasikan sampai dengan periode triwulan II capaian wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina mencapai 180 UKM/Wirausaha atau setara dengan 30,77% dari target tahun 2023 sebanyak 585 UKM/Wirausaha. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada triwulan II yang hanya mencapai 101,3 persen.

**Tabel 3.8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian sd TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
7	Wirausaha Hasil KP yang Ditumbuhkan dan Dibina (UMKM)	585	100	180	100	30,77

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II 2023, meliputi:

1. pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha peserta penciptaan wirausaha baru, koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta analisis kebutuhan usaha. Peserta yang telah menjalankan usaha, setelah mengikuti rangkaian kegiatan penciptaan wirausaha baru dan dilakukan evaluasi keberlanjutan usaha pengolahan produk perikanan serta pendampingan, berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Bandung, Tangerang, Cikampek, Pasuruan, Banda Aceh, Palembang, Rokan Ilir, Samarinda dan Bau-Bau.
2. Pembinaan dan pendampingan untuk pelaku usaha pengolahan perikanan lainnya melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan pendampingan calon wirausaha, wirausaha, dan tenaga kerja telah dilakukan di Sragen, Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan Penjaringan Minat dan Identifikasi Kebutuhan Usaha di Kabupaten Sragen

3. Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Sumedang, Cilacap, Jombang, Tulang Bawang Barat, Merauke, Kupang dan Purwakarta. Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan dihadiri oleh Anggota DPR-RI, perwakilan pejabat dari Ditjen PDSPKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat, Lembaga Keuangan Setempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Hadir sebagai peserta adalah 100 orang pelaku usaha yang terdiri atas pembudidaya ikan air tawar, nelayan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan setempat. Pada kegiatan bimtek ini KKP juga bekerjasama dengan DPMPTSP setempat mengadakan gerai layanan Perizinan yaitu berupa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).





Gambar 3.15 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan

4. Monitoring dan evaluasi wirausaha dan penjangkaran minat, serta identifikasi kebutuhan usaha.

Rata-rata permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha pemula adalah terkait keterbatasan modal termasuk peralatan untuk membangun usaha, legalitas produk, kemasan yang masih sederhana serta lemahnya manajemen/pengelolaan usaha. Saat pembinaan telah disampaikan terkait permodalan terdapat berbagai skema pembiayaan baik yang berasal dari bank ataupun non bank, selain itu wirausaha juga dapat aktif menghubungi divisi khusus yang menangani terkait pembiayaan di Direktorat Usaha dan Investasi. Adapun terkait legalitas produk dapat secara aktif menghubungi dinas teknis yang menangani seperti dinas Kesehatan untuk PIRT. Terkait pengelolaan usaha wirausaha saat dilakukan pembinaan telah disampaikan agar memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha, melakukan pencatatan keuangan sederhana, melakukan pencatatan stok produk dan bahan baku, dan sebagainya.

Wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pembinaan pada triwulan II tahun 2023 terlampir.

Alokasi anggaran untuk wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp6.415.000.000,- hingga triwulan II anggaran yang terserap adalah sebesar Rp1.555.087.569,- atau setara dengan 24,24% dari total anggaran.

#### **IK9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program**

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan

perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit program adalah jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan yang bersumber dari kredit program, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), serta bentuk pembiayaan program lainnya, baik dari lembaga keuangan bank maupun nonbank.

**Tabel 3.9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	sd TW II	Capaian sd TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
8	UMKM Kelautan Dan Perikanan Yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program (UMKM)	500	100	154	154	30,80

Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada triwulan II tahun 2023 adalah sebanyak 154 UMKM. Capaian ini setara dengan 154% terhadap target triwulan II tahun 2023 sebanyak 100 UMKM, atau sebesar 30,8% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 500 UMKM. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Fasilitasi pembiayaan yang dilakukan berupa edukasi literasi keuangan dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program pada triwulan II tahun 2023 antara lain:

1. Identifikasi Lokasi dan Calon Debitur Potensial

Kegiatan identifikasi potensi akses pembiayaan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2023. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lokasi potensial untuk pengembangan klaster-klaster pembiayaan di abupaten/kota yang menjadi target atau prioritas. Adapun informasi yang diidentifikasi meliputi: a) Komoditas unggulan; b) Potensi dan sebaran pelaku usaha

sektor KP; c) Jenis Usaha eksisting; d) Permasalahan serta kendala yang dihadapi; e) Potensi akses pembiayaan yang tersedia; dan f) Dokumentasi Lokasi.

Adapun lokasi yang akan menjadi target untuk kegiatan Fasilitas Akses Pembiayaan adalah Kabupaten Rembang dan Kebumen. Hasil dari indentifikasi sebagai berikut :

#### 1) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Lokasi potensial untuk dikembangkan menjadi klaster pembiayaan adalah Desa Sarangmeduro, Kecamatan Sarang. Desa Sarangmeduro berada di pesisir pantai utara Jawa memiliki warga sebanyak 3.500 jiwa atau kurang lebih 1.150 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya berprofesi di bidang perikanan terutama sebagai nelayan. Selain nelayan, masyarakat Sarangmeduro dan sekitarnya juga menjalankan usaha pengolahan, pemasaran dan jasa perikanan seperti docking kapal. Potensi pembiayaan yang eksisting adalah PT. PNM yang telah beroperasi di Desa Sarangmeduro sejak tahun 2017. Sampai saat ini terdapat 600 pelaku usaha aktif yang telah menjadi nasabah PT. PNM baik melalui program Mekaar maupun Ulamm. Dari 600 pelaku usaha tersebut hanya 10 orang yang mengalami kendala kredit macet (NPL sebesar 1,6%).



Gambar. 3.16 Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Lokasi dan Debitur Potensial Fasilitas Akses Pembiayaan di Kabupaten Rembang

#### 2) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Lokasi potensial untuk dikembangkan menjadi klaster pembiayaan adalah Kecamatan Puring. Salah satu UMKM yang menjadi narasumber dalam identifikasi potensi adalah UMKM Mina Sari yang terletak di Kecamatan Puring. UMKM ini memiliki usaha pengolahan ikan asap, abon ikan, dan siamay ikan, dan berencana mengakses permodalan untuk mendukung kelancaran usaha berupa pembelian kendaraan roda 3. Selain itu, UMKM Mina Sari juga berminat untuk melengkapi perizinan berusaha (SKP dan Kusuka). Potensi pembiayaan

yang eksisting di Kabupaten Kebumen adalah PT. BPR BKK, dimana dilaporkan bahwa sampai dengan akhir Mei 2023, PT. BPR BKK Kabupaten Kebumen telah menyalurkan permodalan kepada 300 pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan dengan nilai mencapai Rp3,1 miliar. Peningkatan penyaluran di sektor perikanan meningkat pasca penandatanganan kerja sama pembiayaan antara PT.BPR BKK dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada tahun 2022.



Gambar 3.17 Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Lokasi dan Debitur Potensial Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Kebumen

Sebagai tindak lanjut atas hasil identifikasi dan verifikasi, selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan di masing-masing lokasi pada periode selanjutnya.

## 2. Kegiatan Fasilitasi Permodalan Ultra Mikro di Kabupaten Karanganyar

Dalam rangka meningkatkan usaha kelompok pengolah ikan di Kabupaten Karanganyar, telah dilakukan sosialisasi permodalan ultra mikro oleh PT. PNM di Rumah Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Terpadu (Puspita), Desa Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, pada Selasa, 23 Mei 2023. Kegiatan dihadiri tim Direktorat Usaha dan Investasi, PT PNM cabang Solo, Dinas KP Kabupaten Karanganyar dan Penyuluh Perikanan, serta diikuti oleh 40 orang pengolah anggota Koperasi Srikandi Trampil Mandiri sebagai peserta.

Tujuan kegiatan adalah untuk membantu para pengolah wanita untuk mendapatkan permodalan yang terjangkau. Selain permodalan, PT PNM juga memberikan edukasi dan pendampingan berupa manajemen keuangan, pemasaran, serta fasilitasi pengurusan NIB, PIRT, dan halal secara gratis. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah kunjungan awal oleh pendamping PNM setempat bersama TPUKP pada pertemuan mingguan kelompok untuk survey dan validasi data.

3. Revisi Permen KP Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan.

Rangkaian rapat untuk menyusun rancangan perubahan Permen KP tersebut dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan yaitu pada tanggal 17 April, 29 Mei dan 15 Juni 2023. Rapat melibatkan perwakilan Biro Hukum, Koordinator Hukum Setditjen PDSPKP, perwakilan Ditjen Perikanan Budidaya, perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap, serta perwakilan Koordinator Kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi. Rapat membahas rumusan rancangan perubahan Permen pasal demi pasal, mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Perwakilan Ditjen terkait diminta untuk segera menyampaikan perubahan struktur biaya pada lampiran Permen KP menyesuaikan dengan kondisi usaha terkini. Hasil rapat selanjutnya akan disampaikan kepada Koordinator Hukum Setditjen PDSPKP untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alokasi anggaran untuk kegiatan UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp536.000.000,-, hingga triwulan II anggaran yang terserap adalah sebesar Rp247.870.883,- atau setara dengan 46,24% dari total anggaran.

#### **IK10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)**

Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisela oleh TPUKP meliputi: (1) Fasilitasi Pembiayaan, (2) Fasilitasi Perizinan Usaha, (3) Identifikasi Pengembangan Kelembagaan, (4) Identifikasi Kemitraan.

Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan oleh TPUKP untuk mengakses pembiayaan pada periode berjalan, baik pendampingan fasilitasi pembiayaan ke lembaga keuangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, perizinan berusaha yang menjadi salah satu syarat untuk mengakses pembiayaan, penguatan kelembagaan, maupun kemitraan.

**Tabel 3.10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi Dan Layanan Usaha (GISELA) pada Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian sd TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
9	UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) (UMKM)	2.135	500	708	141,6	33,16

Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebanyak 708 UMKM yang terdiri atas 528 UMKM yang mendapatkan pembiayaan dengan realisasi kredit sebesar Rp22,51 milyar dan 180 UMKM pengolahan yang mendapatkan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha). Capaian ini setara dengan 141,6% terhadap target triwulan II tahun 2023 sebanyak 500 UMKM, atau sebesar 33,16% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 2.135 UMKM. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena kegiatan Gisela baru dilaksanakan di pusat pada tahun 2023, dengan penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Realisasi jumlah UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program, selain jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan (realisasi akad kredit), namun juga mencakup UMKM yang didampingi untuk mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha), penguatan kelembagaan, maupun kemitraan.

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja ini diantaranya:

1. Pendampingan UMKM melalui kegiatan Gisela oleh 81 personil TPU KP yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Kehadiran TPUKP melalui fasilitasi Gisela turut berkontribusi pada penyaluran kredit program baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan nonbank, pemenuhan perizinan berusaha (NIB), dan pendampingan kelembagaan UMKM untuk menjadi koperasi.
2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dan BRI tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan dalam Peningkatan Ekonomi Sektor KP yang dilaksanakan pada event UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo di Ballroom KKP. Upaya ini diharapkan dapat mendukung percepatan penyaluran KUR di sektor kelautan dan perikanan.

3. Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank BRI dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data binaan TPUKP untuk dapat difasilitasi KUR BRI maupun program pembiayaan lainnya. Pertemuan koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023.
4. Edukasi literasi keuangan tentang pembiayaan ultra mikro dari PT. PNM dan PT. Pegadaian kepada tenaga pendamping usaha yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 April 2023. Tujuan edukasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman TPUKP tentang alternatif pembiayaan yang dapat diakses dari lembaga keuangan non bank, disesuaikan dengan kemampuan UMKM binaannya yang belum layal mengakses permodalan ke lembaga keuangan perbankan.



Gambar 3.18 Dokumentasi Kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha secara *Online* dan *Offline*

Alokasi anggaran untuk kegiatan UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp2.900.000.000,- hingga triwulan II anggaran yang terserap adalah sebesar Rp1.108.377.119,- atau setara dengan 38,22% dari total anggaran.

#### **IK11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir**

Fasilitasi kemitraan usaha merupakan kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk

mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

Capaian ini diperoleh dengan menghitung setiap UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir adalah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha.

**Tabel 3.11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan II tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian Sd TW II	% thd Target TW I	% thd Target 2023
10	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	84	20	35	175	41,67

Capaian output UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir hingga Triwulan II tahun 2023 yaitu telah terfasilitasi 35 UMKM yang telah memiliki sertifikat PIRT atau tercapai 75% dari target triwulan II sebanyak 20 UMKM. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebanyak 84 UMKM, maka telah tercapai sebesar 41,67%.

Fasilitasi kemitraan agar pelaku usaha mampu mendapatkan sertifikat PIRT, diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasarannya ke Retail Modern, dan meningkatkan nilai kepercayaan konsumen akan jaminan mutu dan keamanan pangan produk para pelaku usaha. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 bertempat di Karanganyar. Acara dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri perwakilan Dinas pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan, dan peserta UMKM sebanyak 50 orang.





Gambar 3.19 kegiatan Fasilitasi sertifikat produksi pangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan

2. Fasilitasi Kemitraan Usaha dalam rangka pengembangan UMKM sektor kelautan dan perikanan dalam event UMKM Kelautan dan Perikanan *Thrive Expo* di Ballroom Mina Bahari KKP. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Bapak Riza Damanik dan Direktur Utama BRI. Hadir sebagai peserta adalah 310 pelaku usaha melalui luring dan 220 peserta secara daring, terdiri atas pelaku UMKM, lembaga pembiayaan, lembaga perizinan/sertifikasi dan Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT. Agro Jabar (Perseroda) dengan PT. Regenerasi Kehidupan Nusantara tentang Kerja Sama Penyediaan, Pemanfaatan, dan Distribusi Pupuk Hayati Berbahan Dasar Rumput Laut.
3. Berkontribusi dalam penyusunan usulan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang kemitraan pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di sektor kelautan dan perikanan pada tanggal 2 Maret 2023 di Ruang Rapat Investasi, yang mengundang perwakilan dari Biro Hukum dan Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait.

Alokasi anggaran untuk UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp804.000.000,- hingga triwulan II anggaran yang terserap adalah sebesar Rp287.257.614,- atau setara dengan 35,73% dari total anggaran.

#### **IK12. Startup millenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi**

*Startup* Milenial yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah *startup* yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, baik berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung, yang dikelola oleh generasi milenial. *Startup* di sektor kelautan dan perikanan bergerak

dalam berbagai ragam inovasi, yakni Fintech, Nanobubble, *Autofeeder*, Internet of Things (IoT) Tambak, *E-Commerce*, *Marketplace*, *Portable Pond*, dan *Water Quality Equipment*. Pembinaan *startup* sektor kelautan dan perikanan dalam rangkaian kegiatan Pengembangan *Startup* Millenial sebagian besar akan diarahkan untuk mendukung pembangunan Kampung Budidaya Perikanan, Kampung Nelayan Maju, dan lokasi perikanan strategis, melalui melalui fasilitasi kemitraan, implementasi inovasi teknologi beserta pendampingan teknis peningkatan produksi, akses distribusi/logistik, pemanfaatan fitur fintech, serta pemasaran berbasis teknologi modern untuk pelaku usaha skala UMKM di wilayah tersebut.

Indikator kinerja *startup* milenial adalah dengan melakukan fasilitasi dan pembinaan. Target jumlah pelaku usaha *startup* milenial merupakan UMKM yang terdiri dari *startup* milenial yang bersangkutan dan pelaku usaha mitra *startup*.

**Tabel 3.12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja *Startup* Milenial yang Difasilitasi dalam rangka Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian TW II	% thd Target TW I	% thd Target 2023
11	Startup Milenial (UMKM)	8	-	1	100,00	25,00

Pada tahun 2023, kegiatan pengembangan *startup* milenial ditargetkan sebanyak 8 UMKM. Capaian kinerja kegiatan ini pada triwulan II tahun 2023 sebanyak 1 UMKM, atau tercapai 25% dari target tahun 2023. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 sebesar Rp117.186.309,- atau 23,44% dari total anggaran Rp500.000.000,-.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi, antara lain:

1. Koordinasi dan peninjauan kerja sama pengembangan startup perikanan dengan Alpha JWC Ventures

Kegiatan koordinasi dan peninjauan kerja sama dengan Alpha JWC Ventures dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 di Ruang Rapat Direktorat Usaha dan Investasi. Alpha JWC Ventures adalah firma modal ventura yang telah meluncurkan dana investasi lebih dari Rp 9,2Triliun di Indonesia. Alpha JWC Ventures memiliki 80+ Startup portfolio dengan 90% Startup beroperasi di Indonesia, termasuk diantaranya 4 Unicorn dan 27 Centaurs

Startup yang bergerak di sektor perikanan yang sedang dibina oleh Alpha JWC Ventures yaitu eKan dan DELOS. Startup eKan adalah startup yang bergerak di bidang pemasaran ikan, yang telah membangun jaringan yang luas secara langsung dengan para nelayan dan pengolah makanan laut bernilai tambah untuk menyediakan makanan laut segar Indonesia kepada dunia. Sedangkan DELOS adalah perusahaan aqua-tch berbasis ilmu pengetahuan yang berusaha mendobrak industri akuakultur tradisional dan terfragmentasi di Indonesia, dengan focus pada Asia Selatan secara keseluruhan.

Kolaborasi Direktorat Usaha dan Investasi dengan Alpha JWC Ventures terkait pengembangan usaha startup perikanan eksisting, yaitu berupa fasilitasi modal/investasi, pendampingan manajemen usaha, melebarkan jaringan kemitraan, dan memperluas jangkauan/pangsa pasar.



Gambar 3.20 Kegiatan Fasilitasi Startup Perikanan dalam rangka pengembangan Kampung Budaya Patin di Sragen

Beberapa startup perikanan binaan Direktorat Usaha dan Investasi yang diharapkan dapat dikembangkan oleh Alpha JWC Ventures, antara lain Venambak, Nalayan Indonesia, EdenFarm, Mina Ceria Nusantara, Jack Don't Swim, Lobstech, Cooljek Indonesia, Tarunaku Fishsnack, dan Banoo.

### **3.2.7. Sasaran Strategis 7**

**Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan**

**IK13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan**

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dalam lingkup penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Usaha dan Investasi.

Pada tahun 2023, target tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi sebanyak 4.794 orang. Capaian ini belum dapat dihitung pada triwulan II, karena periode pelaporan untuk indikator kinerja ini memiliki periode tahunan.

**Tabel 3.13. Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian TW II	% thd Target TW I	% thd Target 2023
12	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	4.794	-	-	-	-

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk mendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

1. Perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan; dan
3. Fasilitasi dan pembinaan Wirausaha, Gisela, Kemitraan Usaha dan Startup Millennial bagi UMKM KP di lokasi-lokasi prioritas di seluruh Indonesia.

**3.2.8. Sasaran Strategis 8**

**Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

**IK14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Secera teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$ .

**Tabel 3.14. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	PERSENTASE TERHADAP TARGET (%)
13	Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75	-	-

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Usaha dan Investasi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Usaha dan Investasi untuk menindaklanjuti hasil reuiu Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

#### **IK15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

**Tabel 3.15. Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
		2023	TW II	Capaian TW II	% thdTarget 2023
14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2	76	76,8	-

Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 83,2. Capaian pada semester II adalah sebesar 76,8 atau mencapai 101,05%.

**IK16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan rewiu laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

**Tabel 3.16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan I Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
		2023	Capaian	% thd Target 2023
15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5	-	-

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

### IK17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

**Tabel 3.17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
		2023	Capaian	% thdTarget 2022
16	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (persentase)	≤ 0,5	-	-

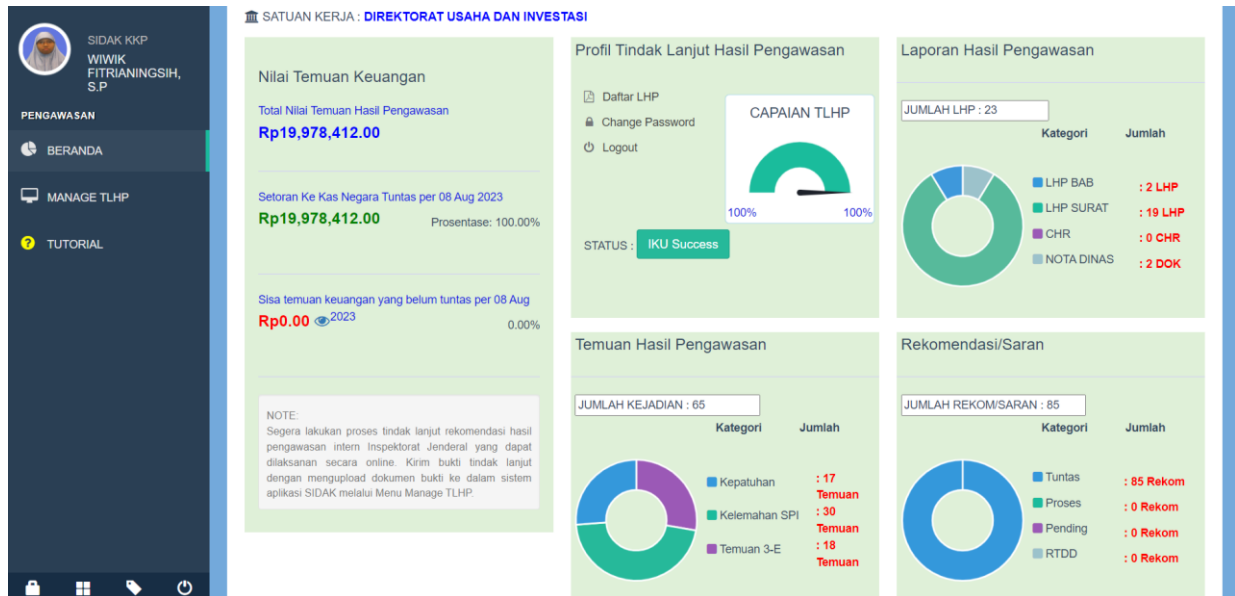
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

### IK18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Pengukuran capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan setiap triwulan. Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK, tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II 2023 mencapai 133,33%, dimana seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi.

**Tabel 3.18. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75	75	100	133,33	133,33



Gambar 3.21 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 20 Juli 2023

Berdasarkan laporan hasil reviu Inspektorat Jenderal Nomor R.129/ITJ.4/HP.470/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022 tentang Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Semester I Tahun 2022 pada Direktorat Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi:

1. Reviu terhadap penyaluran KUR sektor Kelautan dan Perikanan pada periode semester I 2023 melalui uji petik oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Direktorat Usaha dan Investasi pada 3 (tiga) lokasi yaitu Provinsi Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara;
2. Konsolidasi data UMKM KP di pusat dan daerah (lokus prioritas) untuk mengidentifikasi calon debitur potensial melalui data KUSUKA dan koordinasi intensif dengan perbankan melalui Rapat Kelompok Kerja Kredit Program Sektor KP untuk



pemetaan data calon debitur yang akan difasilitasi kredit program atau program pembiayaan lainnya.

3. Rapat pembahasan rancangan perubahan Permen KP Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan mengacu pada Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 dan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

### **IK19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi**

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Dalam upaya penerapan inovasi tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Usaha dan Investasi telah mengusulkan sistem perizinan berusaha pengolahan ikan dilaksanakan berbasis risiko, post audit untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar, dan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS), disingkat SI IKAN BERPROTEIN dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD Tahun 2022. Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi telah mengusulkan kembali inovasi pelayanan publik SI IKAN BERPROTEIN untuk berkompetisi agar mendapatkan peringkat 99 terbesar, dan juga kegiatan Gisela sebagai salah satu inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Capaian kinerja ini belum dapat diukur, karena baru akan diperhitungkan pada akhir tahun.

### **IK20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar**

Indikator kinerja ini merupakan indikator kedelapan yang ditetapkan untuk mengukur sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah monitoring dan pendampingan keaktifan pengunggahan

data dan informasi ke dalam akun Bitrix24, yang pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.19 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2023	TW II	Capaian TW II	% thd Target TW II	% thd Target 2023
18	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	92	92	100	108,69	108,69

Pada triwulan II tahun 2023, persentase unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar mencapai 100% atau setara dengan 108,69% terhadap target triwulan II tahun 2023 sebesar 92%. Capaian tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 100% namun nilai target yang ditetapkan terdapat perbedaan yaitu pada tahun 2022 persentase capaian terhadap target sebesar 116,28% dengan target 86.

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan tingkat keaktifan eselon II, koordinator dan subkoordinator lingkup Direktorat Usaha dan Investasi dalam melakukan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun Bitrix24 serta keikutsertaan seluruh pegawai unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi.

**IK21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 95 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

**Tabel 3.20. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
		2023	Capaian TW II	% thd Target 2023
19	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95	-	-

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 95%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

## **IK22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

**Tabel 3.21 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
		2023	Capaian TW II	% thd Target 2023
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-

Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

## **IK23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.22 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
		2023	Capaian TW II	% thd Target 2023
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5	-	-

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode triwulan II tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan sesuai target.

Dalam masa *recovery* setelah pandemi Covid-19 berdampak pada adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi global yang mulai kembali seperti sebelum adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan pada periode awal di tahun 2023. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat usaha dan investasi terus melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

### 4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Dalam penyusunan peluang investasi *ready to offer* untuk mendukung pengembangan bidang hilir di Wakatobi, Sulawesi Tenggara perlu dilaksanakan penguatan kelembagaan, koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Sulawesi

Tenggara dan Pemkab Wakatobi, sinergitas dengan Direktorat Teknis lain lingkup Ditjen PDSPKP untuk pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan non fisik yang diperlukan yaitu penumbuhan wirausaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan usaha, perluasan akses pasar (terutama untuk poklahsar eksisting), bimtek pengolahan untuk istri nelayan, akses distribusi/logistik ke luar Wakatobi.

2. Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;
3. Ditjen PDSPKP berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi agar melakukan monitoring, pendampingan, dan koordinasi yang lebih intensif kepada para pelaku usaha, untuk mengevaluasi perkembangan implementasi Kesepakatan Kerjasama kemitraan yang telah dilakukan;
4. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten Kebumen dan Rembang.
5. Melaksanakan sosialisasi Permenko bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kepada tenaga pendamping usaha dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan usaha dan investasi di lokus Kampung Perikanan Budidaya dan Kampung Nelayanan Maju, sehingga terfasilitasi kegiatan promosi dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, kelembagaan dan kewirausahaan, serta akses permodalan.

#### **4.3. Tindak lanjut atas rekomendasi triwulan I**

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan I 2023, sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan kegiatan pemetaan peluang investasi usaha KP di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada bulan Maret 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terutama di Desa Sumberagung yang akan dijadikan Kampung Nelayan Maju (Kalaju).

2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan selama periode triwulan II di Kabupaten Bogor, Pekanbaru, Bandung dan Bekasi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah: (a) Menambah wawasan bagi pelaku usaha atau *stakeholder*, antara lain Unit Pengolah Ikan, Pemerintah, petugas pelayanan pemerintah, serta masyarakat umum terkait meningkatkan wawasan terkait Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Ikan melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko serta Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021; (b) Memfungsikan PTSP Pusat dan Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan informasi dan layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA untuk kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
3. Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan oleh Direktur Usaha dan Investasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023. Acara ini turut menghadirkan perwakilan Dinas pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangnyar.
4. Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank BRI dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data binaan TPUKP untuk dapat difasilitasi KUR BRI maupun program pembiayaan lainnya, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023.
5. Telah dilaksanakan pembinaan, pendampingan, edukasi, sosialisasi dan monitoring kepada Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) secara berkala (setiap bulan) selama periode triwulan II 2023.
6. Telah dilaksanakan koordinasi dan peninjauan kerja sama pengembangan startup perikanan dengan Alpha JWC Ventures pada tanggal 24 Mei 2023. Kolaborasi Direktorat Usaha dan Investasi dengan Alpha JWC Ventures terkait pengembangan usaha startup perikanan eksisting, yaitu berupa fasilitasi modal/investasi, pendampingan manajemen usaha, melebarkan jaringan kemitraan, dan memperluas jangkauan/pangsa pasar.
7. Telah dilaksanakan kegiatan UMKM Kelautan dan Perikanan *Thrive Expo* di Ballroom Mina Bahari KKP. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM dan Direktur Utama BRI. Hadir sebagai peserta adalah 310 pelaku usaha melalui luring dan 220 peserta secara daring, terdiri atas pelaku

UMKM, lembaga pembiayaan, lembaga perizinan/sertifikasi dan Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## LAMPIRAN



Lampiran 1.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Daya Saing**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**  
 Jabatan : Direktur Usaha dan Investasi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ishartini**  
 Jabatan : Plt. Direktur Jenderal, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
 Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Ishartini

**PIHAK PERTAMA,**  
 Direktur Usaha dan Investasi

Catur Sarwanto

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
	2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2. Tersedianya peluang investasi yang ready to offer	3. Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4
3. Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3
4. Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)	1
5. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	35
	7. Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	3
6. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/latau dibina (UMKM)	585
	9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)	500
	10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)	2.135
	11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	84
	12. Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)	8
7. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	4.794
8. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
	15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	83,2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	80,5
	17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	≤0,5
	18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	75
	19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
	20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
	21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	95
	22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5
	23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	77,5

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	20.450.000.000
<b>Total Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023</b>		<b>20.450.000.000</b>

Jakarta, Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

**PIHAK PERTAMA,**  
Direktur Usaha dan Investasi



Ishartini



Catur Sarwanto

## Lampiran 2.

## Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan II

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM  
 Nomor 1368/DJPDSPKP.1/TU.140/VII/2023

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP  
 Dari : Direktur Usaha dan Investasi  
 Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan II Tahun 2023  
 Lampiran : Satu berkas  
 Tanggal : 5 Juli 2023

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian IKU yang menjadi tanggung jawab Direktorat Usaha dan Investasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Peluang investasi yang ready to offer**  
 Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* pada triwulan II tahun 2023 telah tercapai 1 (satu) dokumen atau mencapai 25,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni 4 dokumen.
2. **Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya**  
 Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah mencapai 10 lembaga usaha, hal ini sesuai target dan telah mencapai 100%. jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni 35 lembaga maka persentase capaiannya menjadi 28,57%
3. **Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina**  
 Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebanyak 180 UKM/wirausaha telah tercapai sebanyak 180 UKM/wirausaha dan setara dengan 100 %. jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni 585 UKM/Wirausaha maka persentase capaiannya menjadi 30,76%
4. **UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program**  
 Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 154 UMKM, nilai ini setara dengan 102,66% dari target triwulan II, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka persentase realisasinya menjadi 30,8%.

5. **UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)**

Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 708 UMKM, nilai ini setara dengan 118% dari target triwulan II sebesar 600 UMKM, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka persentase realisasinya menjadi 33,16%.

6. **UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir**

Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 35 UMKM, nilai ini setara dengan 100% dari target triwulan II, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka persentase realisasinya menjadi 41,66%.

7. **Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Realisasi Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada triwulan II tahun 2023 adalah 76,80, nilai ini setara dengan 101,05% dari target triwulan II sebesar 76.

8. **Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Realisasi Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada triwulan II tahun 2023 adalah 100%, nilai ini setara dengan 133,33% dari target triwulan II sebesar 75%.

9. **Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar**

Realisasi Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan II tahun 2023 adalah 100%, nilai ini setara dengan 108,67% dari target triwulan II sebesar 75%.



Catur Sarwanto

Tembusan  
 Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP

Lampiran 2

Data Dukung Capaian IKU Peluang investasi yang ready to offer Triwulan II Tahun 2023

### LAPORAN AKHIR

#### PENYUSUNAN DOKUMEN PELUANG INVESTASI READY TO OFFER DI KABUPATEN KEBUMEN

#### "INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG TERINTEGRASI"

Direktorat Usaha dan Investasi  
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Tahun Anggaran 2023



Disusun Oleh :

**Indekstat**  
PT. INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA  
EQUITY TOWER Lt. JI. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD  
Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

### PELUANG INVESTASI YANG SIAP DITAWARKAN

## INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG TERINTEGRASI

*"Keunggulan perairan pesisir selatan Kabupaten Kebumen memiliki potensi untuk bisnis udang vaname yang menguntungkan. Kehadiran Budidaya Udang Berbasis Kawasan menjadi pendorong peningkatan daya saing bagi Kabupaten Kebumen"*

**Kondisi Pasar**  
Permintaan pasar global komoditas udang pada tahun 2022 sebesar 7,14 juta ton. Pasar kemungkinan akan tumbuh 6,40% selama 2023-2028 untuk mencapai volume 10,27 juta ton pada tahun 2028.

**Total Produksi**  
Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03254, 02931, 02956, 10750

**Sarana & Prasarana**

- Air Baku & Air Bersih**: Jarak lokasi ke sumber 400 meter (Sungai) 1 km (Tambak/layang)
- Lintas**: Ganda India Klatowinanagan 60 Megasatit, Ganda India Gombong 60 Megasatit
- Pelabuhan Perikanan**: Pelabuhan Cilecap (80 km, 1 jam 15 menit), Pelabuhan Pangandaran (150 km, 3 jam)
- Pelabuhan Ekspor**: Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya (413 km, 1 jam 15 menit), Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara (470 km, 8 jam 15 menit)
- Bandara**: Bandara J. Besar Soedirman Purbalingga (58 km, 1 jam 42 menit), Yogyakarta International Airport (160 km, 1 jam 10 menit)
- Telekomunikasi**: Jaringan telekomunikasi sudah ada untuk layanan internet dan data untuk seluruh wilayah
- Akses Jalan Lintas**: Jalan Tol Cikamaja (Kabupaten Karanganyar, 3-4 jam)

**Kelayakan Finansial**

**Nilai Investasi Rp. 141,62 Miliar**

- 10% WACC (Weighted Average Cost of Capital)
- 35,26% IRR (Internal Rate of Return)
- 398,74 Miliar NPV (Net Present Value)
- 4 Tahun 4 bulan PP (Payback Period)

**TLUJUAN** PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

**Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

021 3519070 - ext. 6221  
invest.kp@kkip.go.id  
ditjempdskp

### Lampiran 3

Daftar lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya :

1. Koperasi Pemasaran Mina Usaha Rembulan di Kabupaten Sumbawa;
2. Koperasi Produsen Mari Makan Ikan di Kabupaten Bandung;
3. Koperasi Pemasaran Pijarmas Kabupaten Demak;
4. Koperasi Poklahsar Jaya Bersama di Kabupaten Gowa.
5. Koperasi Usaha Amanah Berkah di Kota Makassar;
6. Koperasi Mitra Pangan Nusantara di Kabupaten Gowa.

Lampiran 4.

Daftar User Sistem Manajemen Pengetahuan Direktorat Usaha dan Investasi  
triwulan II Tahun 2022

Lampiran Memorandum  
Nomor : 2224/DJPDSPKP.0/TU.210/VI/2023  
Tanggal : 12 Juli 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM  
NOMOR 2224/DJPDSPKP.0/TU.210/VI/2023

Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP  
2. Direktur di Lingkungan Ditjen PDSPKP  
Dari : Koordinator Kelompok Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat  
Hal : Hasil Penghitungan Persentase Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2023  
Lampiran : 3 lembar  
Tanggal : 12 Juli 2023

Bersama ini terlampir kami sampaikan hasil penghitungan capaian indikator kinerja Persentase Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Esti Budiarti

HASIL PENGHITUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Sekretariat Ditjen PDSPKP

Dokumen	Target	Capaian	%	Kualitas	Target	Capaian	%	Komponen	Nilai	Bobot	%	Hasil Penghitungan TW II
Perjanjian Kinerja	1	1	100	Level 2	3	3	100	Dokumen	100	20%	20	Nilai pada TW I
Rencana Aksi	1	1	100	Koordinator	12	12	100	Kualitas	100	80%	80	Nilai pada TW II
				Subkoordinator	36	36	100					Nilai s.d. TW II (Rata-rata)
												100
												100

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Direktorat Logistik

Dokumen	Target	Capaian	%	Kualitas	Target	Capaian	%	Komponen	Nilai	Bobot	%	Hasil Penghitungan TW II
Perjanjian Kinerja	1	1	100	Level 2	3	3	100	Dokumen	100	20%	20	Nilai pada TW I
Rencana Aksi	1	1	100	Koordinator	12	12	100	Kualitas	100	80%	80	Nilai pada TW II
				Subkoordinator	36	36	100					Nilai s.d. TW II (Rata-rata)
												100
												100

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Dokumen	Target	Capaian	%	Kualitas	Target	Capaian	%	Komponen	Nilai	Bobot	%	Hasil Penghitungan TW II
Perjanjian Kinerja	1	1	100	Level 2	3	3	100	Dokumen	100	20%	20	Nilai pada TW I
Rencana Aksi	1	1	100	Koordinator	12	12	100	Kualitas	100	80%	80	Nilai pada TW II
				Subkoordinator	36	36	100					Nilai s.d. TW II (Rata-rata)
												100
												100

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

3

Direktorat Pemasaran

Dokumen	Target	Capaian	%	Kualitas	Target	Capaian	%	Komponen	Nilai	Bobot	%	Hasil Penghitungan TW II
Perjanjian Kinerja	1	1	100	Level 2	3	3	100	Dokumen	100	20%	20	Nilai pada TW I
Rencana Aksi	1	1	100	Koordinator	12	12	100	Kualitas	100	80%	80	Nilai pada TW II
				Subkoordinator	36	36	100					Nilai s.d. TW II (Rata-rata)
												100
												100

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Direktorat Usaha dan Investasi

Dokumen	Target	Capaian	%	Kualitas	Target	Capaian	%	Komponen	Nilai	Bobot	%	Hasil Penghitungan TW II
Perjanjian Kinerja	1	1	100	Level 2	3	3	100	Dokumen	100	20%	20	Nilai pada TW I
Rencana Aksi	1	1	100	Koordinator	12	12	100	Kualitas	100	80%	80	Nilai pada TW II
				Subkoordinator	36	36	100					Nilai s.d. TW II (Rata-rata)
												100
												100

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Lampiran 5

Nilai indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Daya Saing  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

3

MEMORANDUM  
NOMOR 2225/DJ.PDSPKP.0/KP.220/VII/2023

Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP  
2. Direktur di Lingkungan Ditjen PDSPKP  
3. Kepala BBP3KP  
Dari : Koordinator SDM Aparatur dan Organisasi  
Ha : Hasil Capaian Sementara IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup  
Direktorat Jenderal PDSPKP Semester I Tahun 2023  
Lampiran : 2 lembar  
Tanggal : 12 Juli 2023

Lampiran Memorandum  
Nomor : 2225/DJ.PDSPKP.0/KP.220/VII/2023  
Tanggal : 12 Juli 2023

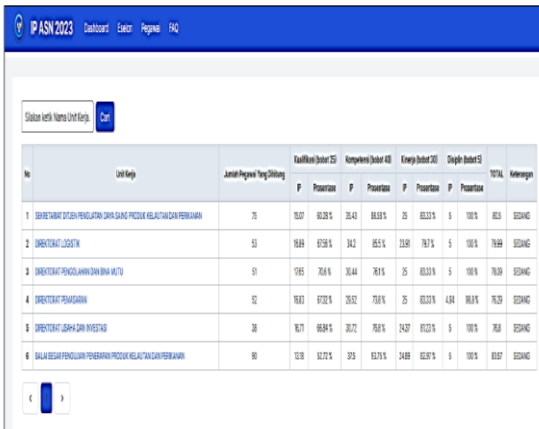
HASIL CAPAIAN SEMENTARA IKU INDEKS PROFESIONALITAS ASN  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PDSPKP SEMESTER I TAHUN 2023

Bersama ini kami sampaikan Capaian Sementara IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Semester I Tahun 2023 dari hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP pada tanggal 12 Juli 2023 yaitu sebesar **78,71 (kategori sedang)** yang terdiri atas **Kualifikasi 16.06, Kompetensi 32.97, Kinerja 24.7, dan Disiplin 4.99**

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Edy Sofian Oskandar



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dilatih	Kualifikasi (Subst 5)		Kompetensi (Subst 10)		Kinerja (Subst 20)		Disiplin (Subst 5)		TOTAL	Kategori
			P	Persentase	P	Persentase	P	Persentase	P	Persentase		
1	SEKRETARIAT BIDANG PELAYANAN DAN SAINGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	75	15,07	60,29%	25,43	68,91%	25	63,33%	5	100%	80,5	SEDANG
2	DIREKTORAT LOGISTIK	53	16,69	67,58%	34,2	85,1%	33,69	78,7%	5	100%	79,69	SEDANG
3	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA ALAT	51	17,65	70,8%	30,44	78,1%	25	63,33%	5	100%	79,09	SEDANG
4	DIREKTORAT PERAGASARIAN	52	16,63	67,28%	28,32	70,6%	25	63,33%	4,84	88,6%	76,29	SEDANG
5	DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI	38	10,71	66,84%	20,72	78,6%	24,27	61,23%	5	100%	76,0	SEDANG
6	BALAI BESAR PENGULAN PERUBAHAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	86	12,78	62,72%	27,5	63,71%	34,69	65,91%	5	100%	69,97	SEDANG

Lampiran 5

Nilai Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

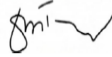
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM  
NOMOR 2180/DJPDSPKP.0/TU.210/VII/2023

Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP  
2. Direktur di Lingkungan Ditjen PDSPKP  
3. Kepala BBP3KP  
Dari : Koordinator Kelompok Keuangan dan Umum  
Hal : Hasil Capaian Sementara IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 10 Juli 2023

Bersama ini kami sampaikan capaian sementara IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%) pada semester I Tahun 2023 pada dashboard aplikasi SIDAK KKP yaitu sebesar **98,04 %** dengan rincian capaian IKU per unit eselon II sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

  
Minuk Irawati

